

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia, membuat dunia usaha menjadi semakin kompleks, bervariasi serta sangat dinamis. Perkembangan tersebut telah membawa perusahaan kepada budaya kerja yang baru yang lebih menekankan pada inovasi perusahaan tersebut. Baik kita sadari maupun tidak, perkembangan usaha yang terjadi di masyarakat telah menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang terjadi di dalam dunia bisnis. Hal tersebut membuat setiap perusahaan yang ada terus berusaha untuk menggali potensi yang dimilikinya.

Dengan kondisi persaingan usaha yang semakin ketat tersebut, maka perusahaan berusaha agar dapat mencapai tujuan intern perusahaan tersebut, terutama dalam usaha untuk menciptakan laba atau keuntungan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah karena perusahaan harus memiliki mekanisme untuk bersaing yang efektif serta sistem pengendalian intern yang efisien agar dapat menghasilkan laba yang besar bagi perusahaannya.

Selain itu, dengan semakin besarnya aktivitas atau operasi perusahaan maka tidaklah memungkinkan apabila seorang manajer harus mengawasi jalannya perusahaan secara langsung. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu, tenaga, pemikiran serta pengetahuan yang dimiliki oleh seorang manajer. Sementara dalam aktivitas di sebuah perusahaan sangat menuntut adanya

kecakapan serta ketepatan dalam pengambilan keputusan saat menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu ada pendelegasian wewenang atas tugas operasional dari manajer puncak kepada manajer bagian. Hal ini bertujuan agar pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan dapat dilakukan dengan cepat oleh para manajer bagian sehingga kontinuitas perusahaan dapat terjaga. Namun kegiatan para manajer bagian ini harus diawasi oleh manajer puncak agar tidak terjadi penyimpangan terhadap rencana awal perusahaan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka diperlukan kegiatan pengendalian yang dapat menjamin bahwa operasi perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan dari perusahaan tersebut. Agar pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan peraturan atau pedoman yang jelas untuk mencapainya. Pedoman-pedoman dalam menjalankan pengendalian intern tersebut dijabarkan dalam pengendalian intern.

Berdasarkan pengertian dari Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) dalam Cangemi (2003;69) memberikan definisi dari pengendalian intern adalah:

“Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management and other personal, designed to provide reasonable assurance regarding to the achievement of objectives in the following categories: (1)the effectiveness and efficiency of operations, (2)the reliability of financial reporting and (3) the compliance with applicable law and regulations”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses dan aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Pengendalian intern merupakan bagian integral dari proses manajemen. Karena konsep dasar dari pengendalian intern meliputi : (1) berbagai kegiatan, (2) dipengaruhi oleh manusia, (3) diharapkan dapat mencapai tujuan (Arens 2000:292).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak manajemen memiliki peran untuk menyusun, melaksanakan dan selalu mengawasi secara terus-menerus proses berlangsungnya pengendalian intern dalam perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengendalian intern mencakup alat, metode serta cara yang memiliki peranan sangat penting dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan. Pengendalian intern yang baik harus mampu mencegah perusahaan dari segala bentuk kehilangan harta atau *asset* milik perusahaan. Kehilangan harta harus dicegah karena kehilangan tersebut akan mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan perusahaan.

Pada perusahaan pembiayaan, harta yang paling utama adalah pemberian kredit pembiayaan kepada konsumen karena jantung kehidupan perusahaan atau sumber pendapatan utama perusahaan *leasing* ini ada pada pemberian kredit pembiayaan tersebut. “*Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time*” (Mac Leod dalam Rahmat Firdaus 2004:1).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia dapat memperoleh uang, barang-

barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan pengertian kredit tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila kredit pembiayaan konsumen dapat dikelola atau ditagih dengan baik dan lancar, maka aktivitas perusahaan tidak akan terganggu. Kelancaran aktivitas ini harus terus dijaga mengingat bahwa kredit ini sangat berkaitan dengan likuiditas perusahaan. Yang juga secara langsung akan berpengaruh terhadap modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan.

Kondisi perekonomian yang terus bergejolak juga telah menyebabkan perubahan keberadaan perusahaan pembiayaan dari tahun ke tahun. Jumlah perusahaan pembiayaan banyak mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang banyak menutup atau mencabut izin usaha beberapa perusahaan pembiayaan. Walaupun terjadi penurunan dalam segi jumlah perusahaan pembiayaan yang beroperasi, namun dalam jumlah pembiayaan atau kredit yang diberikan mengalami peningkatan. Begitu juga dalam jumlah *asset* perusahaan pembiayaan. Perkembangan perusahaan pembiayaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Kegiatan Perusahaan Pembiayaan

Tahun	Jumlah Perusahaan	Total Assets (Trilliun Rp.)	Kredit (Trilliun Rp.)
2002	244	39,9	32,5
2003	239	50,1	39,3
2004	237	78,9	55,4
2005	236	96,5	67,6
2006	216	99,3	71,7

2007	217	127,3	117,3
2008	212	168,5	137,2

Sumber: <http://www.ifsa.or.id/index.php>

Berdasarkan tabel diatas, maka persentase perkembangan kegiatan perusahaan pembiayaan yang terjadi di Indonesia dari tahun 2002 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Kegiatan Perusahaan Pembiayaan

Tahun	Perkembangan (%)		
	Perusahaan	Assets	Kredit
2002	-	-	-
2003	-2,0	25,6	20,9
2004	-0,8	57,5	40,9
2005	-0,4	22,3	22,0
2006	-8,4	2,9	6,1
2007	0,4	28,1	63,6
2008	-2,3	32,4	17

Sumber: <http://www.ifsa.or.id/index.php>

Dengan perkembangan total aset dan juga jumlah kredit yang terjadi, maka terjadi persaingan yang sangat ketat dalam rangka memperoleh nasabah baru serta mempertahankan nasabah-nasabah lama. Akibat yang timbul dari persaingan ini adalah perusahaan pembiayaan berusaha memberikan banyak kucuran kredit murah dan mudah yang bertujuan untuk dapat mencapai target secara kuantitas sesuai dengan yang telah diharapkan. Perusahaan berusaha mencari konsumen sebanyak mungkin agar memperoleh pendapatan. Namun, justru kebijakan itulah yang menjadi bumerang bagi perusahaan pembiayaan itu sendiri. Karena apabila perusahaan tersebut tidak selektif dan memberikan kelonggaran secara terus menerus dalam memberikan pinjaman kredit kepada konsumen maka dapat mengakibatkan adanya piutang pembiayaan konsumen

yang tidak dapat tertagih atau *bad debt* yang akan mempengaruhi rasio perputaran piutang. Hal ini akan sangat merugikan perusahaan karena akan mengurangi likuiditas perusahaan.

Dalam proses pemberian kredit pembiayaan hingga pengembalian kredit dalam bentuk uang tunai sangat memungkinkan terjadinya banyak kelalaian yang mungkin akan menghambat pencapaian tujuan perusahaan atau justru menghambat kinerja perusahaan tersebut. Karena itu, maka diperlukan suatu pengendalian internal di dalam mengelola kredit pembiayaan konsumen ini.

Pengendalian intern dapat membantu manajemen dalam mengamankan harta bendanya, menguji ketelitian dan keandalan data perusahaan, meningkatkan efisiensi dan ketaatan pada kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kegiatan utama atau sumber pendapatan yang utama dari perusahaan pembiayaan adalah melakukan pembiayaan yang sebagian besar pembiayaan tersebut dilakukan secara kredit.

Untuk menjaga kondisi usaha tetap dalam keadaan stabil maka diperlukan kebijakan yang tepat didalam aktivitas pemberian kredit dan juga aktivitas penagihan piutang pembiayaan tersebut kepada konsumen. Hal ini sangat penting sebab kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan (manajer puncak) akan sangat memudahkan manajer bagian dan juga karyawan dalam pengambilan keputusan terhadap kredit-kredit bermasalah.

Untuk mencegah terjadinya kredit yang bermasalah yang akan menimbulkan inefisiensi pada pemberian kredit, maka diperlukan sebuah sistem yang kita sebut dengan Pengendalian Intern. Pengendalian intern merupakan alat,

metode, dan cara yang bertujuan untuk menjaga keamanan harta perusahaan. Dalam perusahaan pembiayaan, harta perusahaan yang terbesar adalah piutang pembiayaan konsumen piutang pembiayaan konsumen ini berasal dari jumlah kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Berdasarkan www.ifsa.com, jumlah piutang pembiayaan konsumen ini adalah berkisar antara 30 – 80 % dari keseluruhan *asset* yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, piutang pembiayaan merupakan *asset* yang tingkat likuiditasnya sangat tinggi. Untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan terhadap *asset* perusahaan, maka diperlukan pengendalian intern.

Berdasarkan www.ifsa.com, pada tahun 2008 – 2009, perusahaan pembiayaan dapat menekan angka piutang tak tertagihnya hingga hanya 1% dari total keseluruhan kredit yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan mampu menjalankan pemberian kreditnya dengan efisien sehingga menekan resiko yang mungkin timbul. Selain itu, dikatakan juga bahwa resiko ini jauh lebih kecil daripada resiko yang harus ditanggung oleh perbankan.

Berdasarkan fenomena dan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pengendalian Intern Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Efisiensi Pemberian Kredit (Pada Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang terdapat di kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kegagalan perusahaan pembiayaan dalam mengelola kredit pembiayaannya akan berdampak sangat buruk bagi aktivitas perusahaan tersebut. Kegagalan dalam pengelolaan kredit tersebut akan membuat likuiditas perusahaan menurun yang akan menyebabkan investor merasa tidak nyaman untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan pembiayaan tersebut. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka perusahaan pembiayaan harus membuat suatu sistem pengendalian yang mampu untuk mengendalikan serta menjaga efektivitas operasionalnya sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis dan untuk lebih mempermudah dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian intern prosedur pemberian kredit dilaksanakan di perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang terdapat di Kota Bandung?;
2. Bagaimana proses pemberian kredit dilaksanakan di perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang terdapat di Kota Bandung?;
3. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern prosedur pemberian kredit yang dilakukan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang terdapat di Kota Bandung terhadap berlangsungnya efisiensi pemberian kredit?.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dengan mengacu kepada masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis data dan informasi mengenai pengendalian intern prosedur pemberian kredit dan efisiensi pemberian kredit pembiayaan yang terjadi di dalam perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berhubungan erat dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengendalian Intern Prosedur Pemberian Kredit dilaksanakan di perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang terdapat di Kota Bandung;
2. Untuk mengetahui efisiensi pemberian kredit pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang terdapat di Kota Bandung;
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian intern prosedur pemberian kredit yang dilakukan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang terdapat di Kota Bandung terhadap efisiensi pemberian kredit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi semua pihak. Terutama bagi pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun hasilnya kiranya dapat berguna bagi :

1. Bagi Perusahaan Pembiayaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai pertimbangan dan evaluasi bagi pihak perusahaan pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengendalian intern prosedur pemberian kredit terhadap efisiensi pemberian kredit.

2. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi penulis mengenai bagaimana proses pengendalian intern prosedur pemberian kredit dijalankan dan berpengaruh terhadap efisiensi pemberian kredit.

3. Bagi Pihak lain

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian di bidang ilmu Akuntansi. Semoga penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk kajian selanjutnya mengenai masalah yang berkaitan dengan tema yang penulis kemukakan.